



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH RIAU

Jalan Jend. Sudirman No.233 Pekanbaru 28111

Telepon.0761-23846 Faksmili. 0761-21860

RUMUSAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

TANGGAPAN UMUM

1. Penyelenggaraan penanaman modal adalah segala kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Indonesia, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Proses penyelenggaraan ini melibatkan pengajuan proposal, penyusunan akta, penyetoran modal, dan pengurusan izin usaha di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.

Penyelenggaraan kemudahan berusaha dan adanya jaminan serta kepastian bagi pelaku usaha merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing nasional.

Jaminan kemudahan dalam berusaha ini telah diakomodir pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah paradigma perizinan menjadi berbasis risiko.

2. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penanaman modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan. Lampiran II UU no. 23 Tahun 2014 huruf r yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Bidang Penanaman Modal yaitu :

- a. penetapan pemberian fasilitas/incentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.;
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
 - f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam:
- Pasal 12.
 - (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
 - Pasal 13:
 - (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
 - Pasal 25 ayat (4), Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Pasal 30 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - Pasal 30 ayat (6) penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
4. Berdasarkan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam:
- Pasal 3, Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 6 Ayat (5), Perizinan Berusaha yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perindustrian;
 6. perdagangan;
 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. transportasi;
 9. kesehatan, obat dan makanan;
 10. pendidikan dan kebudayaan;
 11. pariwisata;
 12. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 13. ketenagakerjaan.
 - Pasal 6 ayat (7), Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - Pasal 6 Ayat (8), Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
 - Pasal 9:
 - (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
5. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pasal 6 ayat (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - Pasal 6 ayat (2) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Berdasarkan Peraturan badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, peraturan ini menjadi panduan bagi Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan DPMPTSP dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan pemberian fasilitas penanaman modal secara terintegrasi, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.
7. **Peraturan menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.**
Dalam Peraturan menteri ketenagakerjaan tidak ada defenisi dan pengaturan tentang tenaga kerja lokal. Pasal 1 angka 1 menyatakan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SARAN:

- Penyesuaian dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 : khususnya yang terkait dengan jenis perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha, kemudahan pengawasan perizinan berusaha untuk usaha kecil, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha
- Perlu pengaturan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha (PP Nomor 6 Tahun 2021)

- Perlu Pengaturan Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (PP 7 Tahun 2021).
- **Saran defenisi dan pengaturan tentang tenaga kerja lokal dihapus dari batang tubuh, diganti dengan Tenaga Kerja Dalam Negeri.**

TANGGAPAN KHUSUS

1. Tambahkan frasa rancangan pada judul besar, dengan posisi di tengah atas bukan digabung.
2. Pasal 1 Angka 5 dihapus.
3. Pasal 4.
 - Frasa pemberian insentif, promosi, masyarakat, pengawasan diawali huruf kapital.
 - Huruf m dihapus.
4. Pasal 5.
 - Frasa promosi, pemberian insentif, diawali huruf kapital.
 - ayat (1) huruf g, penormaan disarankan diubah menjadi pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal.
5. Pasal 6 ayat (1) huruf c.
 - Kata **ditetapkan Pemerintah** disarankan dihapus dan diubah menjadi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.(karena dalam ketentuan umum tidak ada defenisi tentang Pemerintah).
 - Frasa masyarakat diawali huruf kapital
6. Pasal 7 ayat (4), ada pendeklegasian, pada saat perda ini ditetapkan agar sebaiknya perbup tersebut segera disusun agar perencanaan dapat dilaksanakan.
7. Pasal 9 ayat (1) Huruf d.
Disarankan disesuaikan dengan penormaan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
8. Pasal 12, frasa modal asing, bidang usaha diawali huruf kapital.
9. Pasal 20, frasa mal pelayanan publik tidak diawali huruf kapital. Frasa pemerintah daerah diawali huruf kapital.
- 10.Pasal 30 ayat (1), tim apa yang dimaksud? Terdiri atas siapa dan dibentuk dengan instrument apa?

11. Pasal 39 ayat (1) penormaan disarankan diubah menjadi:
Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal.
12. Pasal 41, frasa promosi diawali huruf kapital.
13. Pasal 49. Frasa instansi, satuan tugas penanaman modal tidak diawali huurf capital.
14. BAB XIV disarankan dihapus, penormaan yang terdapat dalam BAB XIV dimasukkan dalam Pasal dikenakan sanksi administratif.
15. Pasal 62.
Disarankan ditinjau Kembali untuk mencabut Perda tentang TJSP beserta turunannya. Apakah penormaan yang terdapat dalam Perda TJSP dan turunannya telah diamuat dalam Perda ini?. Pencabutan ini berkaitan dengan pendeklasian pada Pasal 47 ayat (3). Apakah dengan adanya Perda penanaman modal ini mengakibatkan Perda TJSP dicabut, apakah belum dapat diakomodir dalam perda yang telah ada tersebut?
16. Ranperda tidak mencantumkan penjelasan umum dan penjelasan Pasal, disarankan penjelasan umum dan penjelasan pasal untuk dicantumkan.

PEKANBARU, Septem,ber 2025
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM RIAU



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA NO.

TELP.(0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797

BENGKALIS 28751

DAFTAR HADIR PANSUS II PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

HARI/TANGGAL : Selasa/ 01 Juli 2025
PUKUL : 13.30 WIB s/d selesai
ACARA : Rapat Kerja Pansus II Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Modal
DENGAN :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis
7. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
12. Pimpinan PT. Bumi Laksmana Jaya
13. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkalis

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TANTOWI SAPUTRA PANGARIBUAN	KETUA	1.
2.	FEBRIZA LUWU	WAKIL KETUA	2.
3.	HORAS SITORUS, SH	ANGGOTA	3.
4.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	4.
5.	ROSMAWATI SINAMBELA, A.Md. Keb	ANGGOTA	5.
6.	ADIHAN, SH	ANGGOTA	6.
7.	H. MUHAMMAD RAFEE	ANGGOTA	7.
8.	SUYANTO	ANGGOTA	8.
9.	SRI MAZOLI	ANGGOTA	9.
10.	MUHAMMAD ASRUL	ANGGOTA	10.
11.	IBRA TEGUH, SH	ANGGOTA	11.
12.	Hj. ANITA, SH	ANGGOTA	12.
13.	FIRMAN, <i>SA</i> .	ANGGOTA	13.
14.	SURYA RISKI	ANGGOTA	14.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA NO.

TELP.(0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797

BENGKALIS 28751

DAFTAR HADIR OPD

HARI/TANGGAL : Selasa/ 01 Juli 2025
PEKUL : 13.30 WIB s/d selesai
ACARA : Rapat Kerja Pansus II Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Modal
DENGAN :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis
7. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
12. Pimpinan PT. Bumi Laksmana Jaya
13. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkali

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	SOSI LESTARI	JF PKPM Ahli Hadap	2.
3.	SILVIA CAHYAWATI	JF. PKPM Ahli MUDA	3.
4.	Fahrizal	Sekretaris Satpol PP	4.
5.	Yuliani 22.5	Kabid Pengembangan Industri	5.
6.	BUGKE LEFINDO	FABIO Penugihan Bapora	6.
7.	Jonnaizi	JN-PERUS JKD U	7.
8.	M. INDRA BUDINAN	Diskop UKM	8.
9.	Suciawico	Kabid SDA PU/PK	9.
10.	Mantrens	Ketua	10.
11.	(ALDRA KURNIAWAN)	Suhirni	11.
12.	Fahrizal	POLIMD-CRJ	12.
		Analist Hukum Adm	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13.	Rina Permatasari	B.Mulum	13. <i>Rin</i>
14.	ZAMRI	Secretari Bapenda	14. <i>Zamri</i>
15.	Semat	Bapenda	15. <i>Semat</i>
16.	ZULKIFLI'	KENDITPULH DLH R.L	16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA NO. TELP.(0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797 BENGKALIS 28751
WEBSITE : WWW.DPRD.BENGKALISKAB.GO.ID

NOTULA

HARI/TANGGAL : Selasa, 1 Juli 2025
PUKUL : 13.30 Wib s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis
ACARA : Rapat Kerja Pansus II Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
PIMPINAN RAPAT : Febriza Luwu
NOTULEN : Siti Aminah, S.Akun

PESERTA SIDANG/RAPAT :

1. Anggota Pansus Penyertaan Penanaman Modal (Absen Terlampir)Satuan
2. Bapenda Kab. Bengkalis
3. Satpol PP Kb. Bengkalis
4. Dinas PUPR Kab. Bengkalis
5. Dinas PMPTSP Kab. Bengkalis
6. Dinas Perindag Kab. Bengkalis
7. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bengkalis
8. Dispora Kab. Bengkalis
9. DLH Kab. Bengkalis
10. Dinas Sosial Kab. Bengkalis
11. Pimpinan PT. BLJ
12. Bagian Hukum Setda Kab. Bengkalis

KEGIATAN RAPAT :

1. **Wakil Ketua Pansus Penyertaan Modal (Febriza Luwu) :**
 - Meminta kepada Leader terkait yaitu Dinas Perizinan untuk memaparkan dan menjelaskan Ranperda.
2. **Dinas Perizinan (Sosi Lestari) :**
 - Ranperda ini berguna untuk menarik para investor menanamkan modal di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diharapkan dapat tercipta ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan UMKM, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Dengan adanya Perda ini nanti, daerah diharapkan menjadi lebih kompetitif dalam menarik investor dibanding daerah lain.
 - Strategi promosi masih belum detail, tetapi akan ada aturan kedepannya.
3. **Wakil Ketua Pansus Penyertaan Modal (Febriza Luwu) :**
 - Seberapa penting Ranperda ini?

- 4. Dinas Perizinan (Sosi Lestari) :**
 - di dalam Perda ini ada RUPM, agar perangkat daerah menyusun program prioritas tidak tumpang tindih.
 - di dalamnya juga strategi promosi terkait program, kebijakan dan kegiatan menarik investor.
 - Terkait percepatan perizinan sekarang sudah melalui aplikasi OSS yang mempermudah pengurusan perizinan bagi investor.
 - di dalam ini ada Perkada yang betul-betul melibatkan teknis untuk merumuskannya.
- 5. Wakil Ketua Pansus Penyertaan Modal (Febriza Luwu) :**
 - Diharapkan kepada OPD terkait menyampaikan detail secara umum kontribusi masing-masing OPD terkait di dalam Ranperda ini.
- 6. Bapenda (Boyke Lefino) :**
 - Belum dapat memberikan input terkait Ranperda karena belum menerima draft Ranperda.
- 7. Wakil Ketua Pansus Penyertaan Modal (Febriza Luwu) :**
 - Bapenda diberikan waktu untuk mempelajari Ranperda, kemudian memberikan usulan sarannya ke Pansus melalui surat ke DPRD agar ada laporan yang bisa dibuat Pansus terkait Ranperda ini.
- 8. Dinas PUPR (Budi) :**
 - Mempertanyakan fungsi PUPR dalam Ranperda ini?
- 9. Dinas Perizinan (Sosi Lestari) :**
 - PUPR utamanya RTRW karena segala perizinan melihat RTRW, kemudian urusan dasar terkait RDTL, di dalam Ranperda ini juga membicarakan peluang investasi salah satunya lahan.
 - Kemudian berhubungan dengan infrastruktur, jika infrastruktur bagus maka akan dapat menarik investor.
- 10. Dinas Perindag (Yuliani eka) :**
 - perannya mengatur perizinan UMKM sehingga mempermudah UMKM.
 - menetapkan kawasan Industri tertentu yang menarik sektor industri.
- 11. Dinas Koperasi (Jonaidi) :**
 - Apakah Ranperda perlu Naskah Akademik?
 - Peran Dinas Koperasi memang bersangkutan dengan Ranperda ini.
 - Terkait ini, semua dinas terkait dapat memberikan saran dan masukan agar Perda ini dapat diterapkan dengan baik.
- 12. Anggota Pansus (Firman) :**
 - Sepakat dengan Dinas Koperasi, sebelum melaksanakan Ranperda ini, harus dikaji terlebih dahulu lebih mendalam.
 - OPD terkait sebaiknya membuat dulu catatan atau draft yang berhubungan dengan sistem penggalian PAD sesuai poin-poin Ranperda.
 - Perizinan sangat penting dalam penanaman modal, jika dipermudah maka dapat menarik investor.

13. Bagian Hukum (Jefrizal) :

- Ranperda penyelenggaran penanaman modal berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan UU 25 Tahun 2007 dimana penanaman modal yang ruang lingkupnya di dalam Kab/Kota menjadi urusan Kab/Kota, pada intinya Ranperda ini sebagai payung hukum investasi di Kab. Bengkalis.

14. Wakil Ketua Pansus Penyertaan Modal (Febriza Luwu) :

- Disepakati agar OPD membuat draft catatan dan masukan mengenai Ranperda khususnya mengenai penggalian PAD karena PAD menjadi salah satu fokus Bupati Bengkalis dan OPD Leader melakukan koordinasi dengan OPD yang termasuk di dalam Ranperda terkait arah kebijakan dan peran masing-masing OPD.

Bengkalis, 1 Juli 2025.

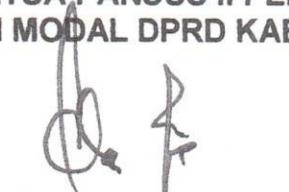
PERISALAH LEGISLATIF

NOTULIS,

**H. NAWAWI ARIF
NIP. 19721217 199803 1 006**

**SITI AMINAH
NIP : 19790206200801 2 008**

**PIMPINAN RAPAT,
WAKIL KETUA PANSUS II PENYERTAAN
PENANAMAN MODAL DPRD KAB. BENGKALIS**



(FEBRIZA LUWU)